



**KOLABORASI POLRESTA PATI DAN BNNK DALAM
PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PEREDARAN
NARKOTIKA**

Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas
Dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan
Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HARI SARJONO

NPM : 211003742018941

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

2025



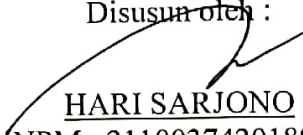
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**KOLABORASI POLRESTA PATI DAN BNNK DALAM PENCEGAHAN DAN
PENINDAKAN PEREDARAN NARKOTIKA**

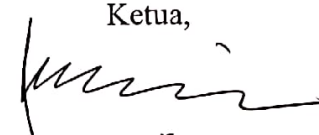
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

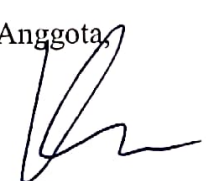
Disusun oleh :


HARI SARJONO
NPM : 211003742018941

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Sri Setiawati, S.H., M.H.
NIDN : 0621016301


Anggota,


Dr. Yulies Tiena Masriani, SH.MH., M.Kn.
NIDN : 0608076201

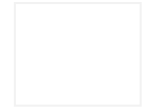
Anggota,


Sri Hartati, SH., MH.
NIDN : 0608076501

Mengetahui
Dekan,


Prof. Dr. Ety Hidayono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025



ABSTRAK

Peredaran narkoba di Kabupaten Pati semakin meningkat dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat kolaborasi antara Polresta Pati dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pati menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan dan penindakan peredaran narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian empiris yang dapat menggambarkan pelaksanaan kolaborasi penegakan hukum antara Polresta pati dan BNNK dalam pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba. Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan kolaborasi antara Polresta Pati dengan BNNK dalam pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kolaborasi antara Polresta Pati dan BNNK Pati dalam pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan prinsip *rechtsmatigheid*, yang memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum memiliki landasan yuridis, etis, dan administratif yang jelas (2) Kolaborasi antara Polresta Pati dan BNNK Pati dalam pencegahan dan penindakan narkoba menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi agar efektivitas kerja sama ini dapat lebih optimal.

Kata kunci :Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Narkoba, Kewenangan

Kepolisian..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	13
C. Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Sistematika Uraian Skripsi	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Kepolisian.....	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	22
C. Pengertian Narkotika.....	37
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Integratif dan Kolaboratif	40

BAB III : METODE PENELITIAN	45
A. Metode Pendekatan	45
B. Spesifikasi Penelitian	46
C. Sumber Data	46
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Metode Penyajian Data	49
F. Metode Analisis Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	51
A. Dasar Hukum Kolaborasi Polresta Pati dan BNNK dalam Pencegahan dan Penindakan Penyalahgunaan Narkotika.....	51
B. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Kolaborasi Pencegahan dan penindakan Narkotika di Wilayah Polresta Pati.....	82
BAB V : PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108